



Analisis Penyebab, Konsekuensi, dan Solusi Potret Investasi di Indonesia Pasca Reformasi

Melinda Wirastiti

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis: melindawirastiti270@email.com

Aditya Arga Widhyasa

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Muhammad Yasin

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Alamat: Jl. Semolowaru No.45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60118

Abstract. *Investment in Indonesia is the main guideline in increasing economic productivity. This research aims to explain the causes, consequences, solutions and conditions of investment in post-reformation Indonesia. This research will examine the factors that influence investment, the impact of investment on the economy and labor market, as well as solutions to improve the investment climate and overcome existing obstacles. not only explains conditions but also explains the role of investment in economic growth, as well as obstacles to economic growth.*

Keywords: *Investment, Economic Growth, Unemployment, Migration, Post-Reformation*

Abstrak. Investasi di Indonesia menjadi pedoman utama dalam meningkatkan produktivitas ekonominya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab, konsekuensi, solusi dan kondisi Investasi di Indonesia Pasca Reformasi. Dalam penelitian ini akan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi investasi, dampak investasi terhadap ekonomi dan pasar tenaga kerja, serta solusi untuk meningkatkan iklim investasi dan mengatasi hambatan yang ada. tidak hanya menjelaskan kondisi namun juga menjelaskan peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi, serta hambatan pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Migrasi, Pasca Reformasi

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih sangat membutuhkan investasi untuk meningkatkan produktivitas ekonominya. Peran investasi dalam perekonomian sangat penting yaitu sebagai penggerak pada pertumbuhan perekonomian suatu negara. Melalui peningkatan investasi sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi yang diharapkan untuk menghasilkan output dan nilai tambah, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Adanya pemerataan distribusi pendapatan dalam menjaga serta meningkatkan stabilitas nasional. Namun, terdapat hambatan dalam kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada saat itu masi terbatas, serta kemampuan dalam menciptakan lapangan kerja relatif kecil dan terdapat kecenderungan mengalami penurunan. Sehingga,

jumlah pengangguran meningkat dikarenakan tidak seimbangnya pertumbuhan angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia.

Secara Teoritis, meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan membantu penyerapan tenaga kerja lebih besar dengan asumsi bahwa dikarenakan terjadinya peningkatan investasi. Selama terjadi krisis ekonomi, penyerapan tenaga kerja nasional mengalami penurunan yang menimbulkan masalah dalam bidang ketenagakerjaan yaitu pengangguran. Selain itu, adanya pemerataan distribusi pendapatan dalam menjaga serta meningkatkan stabilitas nasional. Secara ekonomis, upaya dalam mengurangi jumlah pengangguran melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun, kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada saat itu masi terbatas, serta kemampuan dalam menciptakan lapangan kerja relatif kecil dan terdapat kecenderungan mengalami penurunan. Sehingga, jumlah pengangguran meningkat dikarenakan tidak seimbangnya pertumbuhan angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia.

Ketidakseimbangan jumlah upah yang diperoleh di wilayah desa dan kota, mendorong penduduk desa untuk datang dan mencari pekerjaan ke kota. Kesempatan kerja yang tersedia pada tiap tahunnya mengalami fluktuasi. Peningkatan kesempatan kerja dikarenakan semakin banyaknya investasi di Indonesia. Fluktuasi kesempatan kerja ini sangat bertentangan dengan teori bahwa ketika investasi meningkat maka akan diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja, sehingga perlu dilakukan penelitian secara lanjut.

Fenomena tersebut sudah asing lagi terlebih pada saat pasca reformasi, dikarenakan liberasi ekonomi pasar, makin tingginya kesadaran akan hak-asasi manusia dan tuntutan demokratisasi. Melalui fenomena yang terjadi diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis sebuah penelitian nmengenai “**Analisis Penyebab, Konsekuensi, dan Solusi Potret Investasi di Indonesia Pasca Reformasi**”.

KAJIAN TEORITIS

Untuk menganalisis potret investasi di Indonesia Pasca Reformasi, diperlukan landasan teori yang kokoh. Berikut beberapa teori yang relevan, yaitu :

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Salah satu faktor penting teori pertumbuhan ekonomi yaitu adalah investasi. Investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong transfer teknologi.

2. Teori Liberalisme Ekonomi

Teori liberalisme ekonomi menekankan pentingnya peran pasar bebas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori liberalisme ekonomi meliputi kebijakan deregulasi dan liberalisasi pasar dapat menarik investasi asing dan domestik.

3. Teori Institusi

Teori Institusi menjelaskan bahwa aturan dan norma informal maupun formal dapat memengaruhi perilaku ekonomi. Dalam teori institusi terdapat kelemahan seperti, korupsi dan birokrasi yang rumit dapat menghambat investasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa pengertian tertulis yang diamati. Penelitian yang digunakan sepenuhnya menekankan pada pengumpulan data pustaka maka jenis penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan (Library Research. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu sebagai berikut :

1. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang berupa karya ilmiah : buku, majalah, artikel, opini, makalah, maupun situs-situs yang relevan dengan kajian ini sebagai pendukung argumen.
2. Sumber data primer, yaitu (Durratul Hikmah Fatus Solikhah et al., 2023; Jannah & Asnawi, 2019; Kementerian Tenaga Kerja dan & Transmigrasi, 2011; Kevin Tri Saputra, Syamsul Amar, 2018; Poesoro, 2005; Sjafii, 2009; Suhendra & Istikomah, 2016)

Penelitian kepustakaan ini dilakukan melalui riset kepustakaan, teknik dokumentasi, untuk mencari data terkait penelitian dari sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan yang berkaitan dengan “Analisis Penyebab, Konsekuensi, dan Solusi Potret Investasi di Indonesia Pasca Reformasi”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keadaan Investasi di Indonesia Pasca Reformasi

Ketika krisis moneter melanda perekonomian di tahun 1997, meskipun pada saat itu Indonesia telah merdeka selama 52 tahun, negara ini baru mengalami pembangunan yang cukup signifikan sekitar 30 tahun, yaitu selama era Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Selama pemerintahan Orde Lama pimpinan Presiden Soekarno, proses pembangunan dan kegiatan investasi agak terbengkalai sehingga kondisi perekonomian negara memburuk.

Pada tahun 1965-an dimana Soekarno mulai kehilangan cengkraman kekuasaannya, akibat Partai Komunis Indonesia (PKI) yang gagal hingga mengalami budget deficit sampai pada level 6,6% dari *Gross Domestic Product* (GDP) dan inflasi meroket ke level 594%. Sementara itu perekonomian hanya mampu tumbuh 1,1%, dan penduduk yang hidup dalam kemiskinan berjumlah sekitar 70 persen dari total populasi yang sebesar 105,414 juta orang.

Tercatat, ada delapan sektor yang menjadi fokus realisasi investasi selama periode pasca reformasi dikarenakan krisis moneter yang terjadi. Investasi pada sektor infrastruktur merupakan sektor yang total biaya investasinya paling besar, sektor pembiayaan/UMKM, sektor energi serta sektor transportasi, logistic dan pangan serta sektor pendidikan dan kesehatan pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Pada investasi selanjutnya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena terdapat banyaknya modal yang tersedia untuk pembangunan. Investasi Indonesia berasal dari penanaman modal dalam dan luar negeri. Era pembangunan dan investasi mulai ketika Presiden Soeharto secara formal menjalankan tugasnya pada Maret 1968. Pemerintahan Orde Baru, melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), telah berhasil membangkitkan perekonomian negeri yang sedang terpuruk.

Masalah ekonomi yang telah diwariskan pemerintahan Orde Lama, seperti tingkat inflasi yang sangat tinggi, budget deficit, kemiskinan, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan hutang luar negeri yang sangat besar untuk cepat diatasi. Semasa kepemimpinan Presiden Soekarno Indonesia secara politis dekat dengan Blok Timur karena tidak ada pintu untuk menjalin kerja sama Barat. Namun, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia terdesak oleh berbagai negara untuk menjalin hubungan dengan negara-negara barat serta berbagai organisasi multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *The International Monetary Fund* (IMF) untuk mendapatkan bantuan untuk membenarkan struktur perekonomian yang terpuruk terutama dalam memecahkan masalah hutang luar negeri. Dengan bantuan Negara Barat dalam melunasi hutang luar negeri sebesar 2,4 milyar dollar, yang digunakan untuk membangun angkatan bersenjata (Rezim Soekarno membelanjakan rata-rata 30,6% dari total pengeluaran sepanjang tahun 1951-1965 untuk keperluan militer pada periode tersebut).

Replika pertama telah berakhir pada 1974, sehingga Indonesia berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi hingga rata-rata per tahun mencapai sebesar 8,6% selama periode 1968-1974. Kecepatan pertumbuhan ekonomi ini cukup mengagumkan bila dibandingkan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 2% selama periode 1960-1965. Tingkat inflasi, yang mencapai puncaknya pada tingkat 635.4% pada 1966, dapat

dikurangi sampai tingkat rata-rata per tahun sebesar 28% sepanjang 7 tahun pertama dari era rezim Orde Baru. Pada tahun 1976, jumlah penduduk miskin dapat dikurangi menjadi 40% dari total populasi, di mana 82% di antaranya tinggal di pedesaan

Pada masa pemerintahan Soeharto, berusaha untuk memodernisasi Indonesia dengan mendatangkan negara-negara barat untuk melakukan investasi. Sehingga Pemerintah meluncurkan satu kebijakan tentang Penanaman Modal Asing UU No. 1 Tahun 1967 (UU No. 1/1967 PMA), yang membiarkan investor asing menggunakan sumber-sumber daya dan teknologi dari luar Indonesia, memperbolehkan perusahaan-perusahaan untuk menyewa tenaga kerja asing, dan mengizinkan investor asing untuk mentransfer keuntungan ke negara asal mereka setiap saat. Kebijakan ini terbukti cukup baik dilihat dari meningkatnya nilai investasi asing yang disetujui, dari 192,39 juta pada tahun 1967 ke 331,60 juta dollar AS pada 1968, peningkatan sebesar 72% dalam waktu setahun. Pada tahun terakhir Repelita pertama, 1974, nilai investasi asing yang disetujui sebesar 1,052 milyar dollar AS. periode *recovery* berlangsung dari tahun 1967-1974, terdapat nilai kumulatif investasi asing yang disetujui mencapai level yang cukup tinggi sebesar 3,945 milyar dollar dan lebih dari 20 kali lipat level investasi asing yang disetujui pada 1967 perekonomian berkontraksi sebesar 13,2% pada 1998.

Capital Outflows terjadi karena adanya krisis multidimensi, dimana para investor tidak yakin atas masa depan kegiatan investasi mereka di Indonesia. Sebelum terjadinya krisis moneter pada periode 1990-1996, Indonesia telah berhasil mempertahankan *surplus balance of payments*-nya, rata-rata per tahun sebesar 2,574 milyar dollar AS. Pada tahun pertama terjadi krisis, Indonesia harus menghadapi *balance of payments deficit* sebesar 2,459 dollar AS. *Deficit* yang besar pada *balance of payments* ini disebabkan oleh *outflows* dari modal swasta di Indonesia. Selama 1990an, Indonesia menikmati *private capital inflows* yang besar dalam bentuk *private foreign direct investments* (FDI) dan *private foreign indirect investments* (termasuk di dalamnya *portfolio investments*). *Private* FDI mengalir ke perekonomian Indonesia pada nilai rata-rata 2,715 milyar dollar AS per tahun selama periode 1990-1996. Sementara, *private foreign indirect investments* masuk pada nilai rata-rata yang lebih tinggi, yaitu 3,652 milyar dollar AS per tahun. Pada 1997, 1998, dan 1999, *private indirect investments* jumlah besar ditarik dari perekonomian kita, yaitu sebesar 5,015 milyar, 13,490 milyar, dan 3,722 milyar dollar AS. Sedangkan FDI yang ditarik keluar Indonesia adalah sebesar 356 juta dollar pada tahun 1998 dan 2,74 milyar dollar AS pada 1999.

Pada tahun ke-8 pascakrisis moneter, Indonesia telah mengalami banyak perubahan. Pemerintahan-pemerintahan ini berusaha memulihkan perekonomian Indonesia dan berusaha melakukan perubahan-perubahan di bidang sosial, politik, dan hukum ke arah yang lebih baik

melalui program-program pembangunan mereka. Sejak saat itu, telah terjadi tiga kali pergantian kekuasaan tertinggi di Indonesia. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun tak lepas dari permasalahan-permasalahan ini. Ini di antaranya bisa dilihat dari proses pemulihan perekonomian yang tak dibarengi penciptaan lapangan kerja yang cukup. Fenomena yang dikenal sebagai *jobless recovery* ini merupakan tantangan besar yang harus dipecahkan pemerintahan saat itu. Selama periode pemulihan krisis, *jobless recovery* utamanya terjadi di sektor-sektor perekonomian formal. Sebagai akibatnya, pada 2003 terdapat sekitar 9,5 juta penganggur terbuka Indonesia.

Pemerintahan SBY menargetkan tingkat pengangguran akan turun dari 9,5% pada 2003 ke 6,7% pada 2009. Pemerintahan ini juga mengharapkan tingkat kemiskinan dapat diturunkan dari 16,6 persen pada 2004 ke 8,2% pada 2009. Untuk mewujudkan target-target itu, pemerintahan SBY harus mampu untuk memperbaiki tingkat pertumbuhan ekonomi dari 4,2% pada 2003 menjadi 7,6% pada 2009, sehingga dalam lima tahun masa kekuasaannya pemerintahan ini dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,6% per tahun. Tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 6,6% per tahun itu hanya dapat diwujudkan bila rasio investasi terhadap GDP dapat ditingkatkan dari 20,5% pada 2004 ke 27,4% pada tahun terakhir masa pemerintahan SBY, 2009. Untuk merehabilitasi perekonomian Indonesia, pemerintahan SBY-Kalla harus mampu menarik investor, baik asing maupun dalam negeri, untuk kembali menanamkan uangnya di perekonomian kita. Para investor potensial harus dapat diyakinkan bahwa berinvestasi di negeri ini akan mendatangkan peluang-peluang keuntungan (*profit opportunities*) yang cukup tinggi.

2. Penyebab Investasi di Indonesia Pasca Reformasi

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang masih banyak memerlukan investasi untuk meningkatkan produktivitas ekonominya, investasi dalam perekonomian memegang perananan penting sebagai penggerak ekonomi di suatu negara, Kesempatan kerja di Indonesia mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Meningkatnya angka kesempatan kerja dipengaruhi oleh banyak sektor salah satunya yaitu pada sektor investasi. Banyaknya investasi yang ada menciptakan kesempatan kerja di Indonesia. Namun investasi sektor primer terjadi penurunan investasi secara signifikan pada tahun 2014 sebesar Rp. 16.380.747,6 atau 36,30% yang pada tahun sebelumnya 2013 sebesar Rp. 25.715.550,6. Hal ini disebabkan oleh minimnya modal investasi yang diberikan para investor pada investasi sektor primer khususnya sektor pertambangan. Karena pemerintah kurang memperhatikan masalah keamanan, tidak adanya kepastian hukum, dan kondisi infrastruktur yang buruk, hingga kondisi perburuhan yang semakin buruk serta suasana politik yang memanas pada tahun 2014 saat pemilu

diselenggarakan dan dampaknya masih terjadi pada tahun 2015 yang juga mengalami penurunan sebesar Rp. 15.925.318,3 atau 2,78%. Terjadi penurunan pada investasi sektor tersier tahun 2015 sebesar Rp.73.342.577,6 atau 8,97% dari tahun sebelumnya 2014 sebesar Rp.80.570.600,9 dikarenakan para buruh melakukan aksi demo meminta menaikkan UMR sehingga dapat menghambat aktivitas jasa lainnya dan investor tidak banyak menanamkan modal di investasi sektor tersier pada tahun 2015. Kesempatan kerja yang terus meningkat setiap tahunnya seharusnya di iringi oleh peningkatan investasi namun investasi mengalami naik turun terlihat pada tahun 2014 dan 15 di investasi sektor primer dan tahun 2015 di investasi sektor tersier. Hal ini berbanding terbalik dengan teori, yang menyatakan ketika investasi meningkat maka akan diikuti oleh peningkatan kesempatan kerja, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Menurut Tambunan (2001), Investasi ialah suatu faktor krusial bagi kelangsungan proses pembangunan ekonomi (*sustainable development*), atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Adanya kegiatan produksi maka terciptalah kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat, untuk menciptakan/meningkatkan permintaan di pasar. Investasi dilakukan dengan dua cara yaitu investasi asing dan investasi dalam negeri. Namun pada tahun 2017 inflasi di Indonesia meningkat yaitu 3,61 % di bandingkan 2016 akan tetapi investasi di indonesia justru ikut meningkat yaitu 4,46 % (Statistik Indonesia, 2019). Hal ini bertentangan dengan teori dimana secara teori apabila meningkatnya inflasi maka akan menurunkan investasi karena inflasi dapat meningkatkan biaya perusahaan. Investasi yang rendah merupakan hasil dari akibat adanya kurs yang kurs (Sukirno, 2010). Namun pada tahun 2017 kurs di Indonesia meningkat yaitu Rp. 15.750/Dollar di bandingkan 2016 akan tetapi investasi di indonesia justru ikut meningkat yaitu 4,46 % (Statistik Indonesia, 2019). Hal ini tidak sejalan dengan teori dimana secara teori apabila meningkatnya menurunkan investasi. kurs maka akan Pertumbuhan ekonomi juga menjadi faktor yang menyebabkan tingginya investasi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 menurun sebesar 5 % di bandingkan 2016 akan tetapi investasi di indonesia justru mengalami peningkatan mencapai 4,46 % (Statistik Indonesia, 2019). Hal ini tidak sejalan dengan teori dimana secara teori apabila meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan investasi. Suku bunga yang tinggi dapat menurunkan investasi di indonesia karena para investor tidak lagi menginvestasikan investasinya dalam bentuk sektor riil tetapi sudah menyimpan uang ke bank, juga ditambah dengan kurangnya investasi asing ke indonesia (FDI) oleh sebabnya adanya resiko pertumbuhan ekonomi yang rendah. Investasi di Indonesia pada tahun 2017 telah mengalami peningkatan yaitu 4,46 % sedangkan suku bunga pada tahun 2017 juga meningkat yaitu 6 % . (Statistik Indonesia, 2019).

Adanya Investasi pasca Reformasi di Indonesia terjadi dikarenakan beberapa hal di antara lainnya, yaitu sebagai berikut :

- a. Penyebaran Investasi: Indonesia memiliki investasi yang tersebar di berbagai wilayah, yang membuat investasi lebih disembarangkan dan tidak terpadu.
- b. Kualitas Sumber Daya Manusia: Investasi di Indonesia memiliki karakteristik investasi pasca krisis moneter, yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di tingkat regional, terutama di Indonesia Bagian Barat dan Bagian Timur.
- c. Pendanaan: Investasi di Indonesia memerlukan sumber dana yang cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memulihkan ekonomi dari krisis.
- d. Peran Pelaku Bisnis: Investasi di Indonesia membutuhkan berkat pelaku bisnis, termasuk UMKM, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memulihkan ekonomi dari krisis
- e. Kondisi Ekonomi: Investasi di Indonesia memerlukan kondisi ekonomi yang stabil dan seimbang, yang memungkinkan investor untuk berinvestasi dengan keamanan.
- f. Kebijakan Fiskal: Kebijakan fiskal yang efektif dan transparan sangat penting untuk mendorong investasi.
- g. Infrastruktur: Infrastruktur yang baik, seperti jalan tol, jalan raya, jembatan, bandara, dan pelabuhan, menjadi faktor penting untuk menarik investasi.
- h. Ketat Hukum: Perundang-undangan yang ketat dan hukum yang dijalankan secara transparan dan efektif memiliki peran yang penting dalam mendorong investasi.
- i. Keseimbangan Ekonomi: Ekonomi yang seimbang dan stabil, yang memungkinkan investor untuk berinvestasi dengan keamanan.
- j. Ketat Hukum dan Transparansi: Hukum yang ketat dan transparansi yang tinggi memiliki peran yang penting dalam mendorong investasi

3. Konsekuensi Investasi di Indonesia Pasca Reformasi

Konsekuensi investasi di Indonesia pasca reformasi adalah terdampaknya perekonomian negara yang masih mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2013. Pada periode 2015-19, yang dikenal sebagai Reformasi Ekonomi Tahap I, Indonesia meningkatkan belanja infrastruktur menjadi 2,2-2,8% dari PDB, yang menghasilkan lebih dari 970 km jalan tol, 3.400 km jalan raya, 40 km jembatan, 30 bandara dan pelabuhan, 17 bendungan, dan sejumlah sarana LRT/MRT. Investasi, yang khususnya pada investasi asing langsung (*foreign direct investment* atau FDI), belum banyak beranjak dari US\$30 miliar. Keseimbangan transaksi berjalan berubah dari surplus menjadi defisit, yang menjadi pertanda bahwa Indonesia tidak terlalu bergantung pada ekspor komoditas, yang tidak stabil dan tidak

berkelanjutan. Perekonomian membutuhkan reformasi struktural, yang ditanggapi dengan meluncurkan reformasi infrastruktur yang diperlukan untuk melakukan diversifikasi di sektor riil berupa pabrik dan bisnis untuk memanfaatkan investasi. Pemerintah menanggapi dengan meluncurkan reformasi deregulasi yang bertujuan untuk mendorong FDI dan menciptakan lapangan kerja baru

Dari sisi kondisi ketenagakerjaan ada beberapa hal menarik secara statistik di era ini. Pada tahun 2000 tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Indonesia mencapai 68%. Ini menunjukkan dari setiap 100% penduduk usia kerja, 15 tahun atau lebih, 68% di antaranya aktif di pasar kerja. Yang menarik adalah perbandingan dari TPAK tahun 2000 dan TPAK tahun 1990, karena ada perbedaan definisi tenaga kerja pada kedua titik tersebut. Di tahun 1990, tenaga kerja masih di definisikan sebagai penduduk berusia 10 tahun atau lebih, sedangkan tahun 2000 di definisikan sebagai penduduk 15 tahun atau lebih. Perbedaan TPAK Indonesia ini ternyata justru mengalami kenaikan yang sangat pesat selama tahun 1990-2000, yakni dari 55 % menjadi 68%. Kenaikan ini karena naiknya partisipasi tenaga kerja perempuan. Gerakan reformasi politik telah menstimulasi reformasi serikat pekerja di Indonesia. Banyak pekerja di Indonesia merasa memperoleh kembali hak-haknya untuk berorganisasi secara bebas. Jumlah serikat pekerja pun melonjak. Pada akhir 2004 terdapat lebih dari 80 federasi serikat pekerja yang didaftarkan di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, di samping itu pekerja non-federasi di tingkat nasional masih terdaftar lebih dari 100 serikat. Akan tetapi setelah dilakukan verifikasi keanggotaan serikat pekerja menjelang akhir 2005, terdapat hanya 35 federasi serikat pekerja yang memenuhi syarat dan 31 serikat pekerja non-federasi di tingkat nasional.

4. Solusi adanya Investasi di Indonesia Pasca Reformasi

Investasi berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan berarti juga produksi) dari kapita/modal barang-barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang (barang produksi). Pada dasarnya Investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Investasi juga berperan sebagai komitmen untuk menanamkan sejumlah dana pada saat ini dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa datang. Pada tahun 1967 pemerintah Indonesia menghadapi era keterbukaan ekonomi dengan mengeluarkan UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA). Pemerintah pusat memperbaiki kondisi ekonomi setelah krisis yang terjadi pada tahun 1965 dan mempercepat pembangunan nasional dengan mendatangkan investasi asing (Siagian et al., 2020). Investasi adalah komponen penting untuk meningkatkan modal karena modal yang tersedia di suatu negara atau daerah dapat menentukan kapasitas perekonomian dalam menghasilkan barang-barang dan

jasa-jasa. Investasi memiliki fungsi ganda dalam meningkatkan pendapatan (Danawati et al., 2016). Kedua fungsi tersebut dilihat dari sisi penawaran dan sisi permintaan. Fungsi investasi dari sisi penawaran adalah meningkatkan kapasitas produksi (Dharma & Djohan, 2016). Kapasitas produksi dapat ditingkatkan dengan adanya lapangan kerja baru akan muncul dan dapat mengurangi pengangguran. Fungsi investasi dari sisi permintaan yaitu meningkatkan daya beli masyarakat (Amalia, 2013). Daya beli masyarakat yang tinggi berdampak pada meningkatnya konsumsi rumah tangga, dan akan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan investasi di Indonesia dari tahun 2010-2016 secara umum mengalami peningkatan. Investasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Rofii & Ardyan, 2017). Menurut data statistik Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), total realisasi PMA yang masuk di Indonesia pada tahun 2016 sebesar US\$ 28,96 miliar. Jumlah ini menurun hingga -1,07% dibandingkan 2015.

Pasca reformasi, Indonesia telah mengalami kemajuan dalam menarik investasi. Namun, masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan investasi secara signifikan. Berikut beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan:

a) Meningkatkan Iklim Investasi:

1. Mempermudah perizinan usaha: Mempercepat dan menyederhanakan proses perizinan usaha, termasuk melalui sistem online dan terintegrasi.
2. Menerapkan regulasi yang transparan dan konsisten: Menegakkan hukum secara konsisten dan adil, serta meminimalisir regulasi yang tumpang tindih.
3. Meningkatkan kepastian hukum: Melindungi hak investor dan menyelesaikan sengketa investasi dengan cepat dan adil.
4. Meningkatkan infrastruktur: Membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara, serta infrastruktur digital.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia: Meningkatkan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan keahlian dan produktivitas.

b) Meningkatkan Promosi Investasi:

1. Melakukan promosi investasi yang gencar: Mensosialisasikan potensi investasi Indonesia kepada investor domestik dan luar negeri.
2. Membuat platform informasi investasi yang mudah diakses: Menyediakan informasi yang lengkap dan akurat tentang peluang investasi di Indonesia.
3. Mengadakan forum dan pameran investasi: Mempertemukan investor dengan potential investees dan memfasilitasi kerjasama investasi.

4. Meningkatkan kerjasama internasional: Memperkuat kerjasama dengan negara lain untuk menarik investasi asing.
- c) Memberikan Insentif dan Kemudahan Investasi:
1. Memberikan insentif pajak: Memberikan keringanan pajak bagi investor di sektor tertentu atau di daerah tertinggal.
 2. Memberikan kemudahan dalam pembebasan lahan: Membantu investor dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan usaha.
 3. Memberikan akses kepada kredit dan pendanaan: Membantu investor dalam mendapatkan akses kepada kredit dan pendanaan dengan bunga yang kompetitif.
 4. Menyediakan kawasan industri khusus: Membangun kawasan industri khusus dengan fasilitas yang lengkap dan infrastruktur yang memadai.
- d) Meningkatkan Daya Saing Industri:
1. Meningkatkan efisiensi produksi: Menerapkan teknologi dan proses produksi yang modern dan efisien.
 2. Meningkatkan kualitas produk dan jasa: Meningkatkan standar mutu produk dan jasa untuk memenuhi standar internasional.
 3. Meningkatkan inovasi dan pengembangan produk baru: Mendukung penelitian dan pengembangan produk baru untuk meningkatkan daya saing industri.
 4. Memperkuat kerjasama antar industri: Mendorong kerjasama antar industri untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.
- e) Meningkatkan Peran Pemerintah:
1. Pemerintah perlu berperan aktif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
 2. Pemerintah perlu menyediakan infrastruktur yang memadai dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 3. Pemerintah perlu memberikan insentif dan kemudahan investasi bagi investor.
 4. Pemerintah perlu meningkatkan promosi investasi dan kerjasama internasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Reformasi di Indonesia tidak hanya harus terbatas pada ekonomi makro, melainkan meliputi ekonomi mikro harus diperhatikan. Investasi dianggap salah satu faktor yang penting untuk membangun perekonomian dan memulihkan ekonomi dari krisis. Untuk itu adanya Jurnal Penelitian mengenai “**Analisis Penyebab, Konsekuensi, dan Solusi Potret Investasi di Indonesia Pasca Reformasi**” dapat kita pahami bahwa banyak tantangan yang harus

dihadapi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya serta proses pemulihan krisis ekonomi Indonesia dengan adanya kebijakan investasi yang semakin memudahkan jalannya investasi di Indonesia, seperti pemberian insentif pajak, bantuan perihal kredit dan jaminan, pembentukan satgas khusus investasi luar negeri serta memudahkan proses pengajuan izin usaha dan investasi.

Saran

Jurnal Penelitian yang berjudul “**Analisis Penyebab, Konsekuensi, dan Solusi Potret Investasi di Indonesia Pasca Reformasi**” ini dapat kami selesaikan dan kami menyadari bahwa jurnal penelitian ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu kami harap kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut agar dapat menganalisis serta meneliti secara mendalam mengenai pokok permasalahan ini. Serta, kami harap jurnal penelitian ini dapat membantu dan bermanfaat untuk pembaca sebagai pelengkap dalam pembelajaran. Kami juga memgharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat memperbaiki proposal penelitian ini lebih baik lagi. Terimakasih.

DAFTAR REFERENSI

- (Durratul Hikmah Fatus Solikhah et al., 2023; Jannah & Asnawi, 2019; Kementerian Tenaga Kerja dan & Transmigrasi, 2011; Kevin Tri Saputra, Syamsul Amar, 2018; Poesoro, 2005; Sjafii, 2009; Suhendra & Istikomah, 2016)
- Durratul Hikmah Fatus Solikhah, Angga Dwi Permadi, & Muhammad Yasin. (2023). Analisis Penyebab dan Konsekuensi Investasi di Indonesia Pasca Reformasi. *Student Research Journal*, 1(3), 41–53. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v1i3.313>
- Jannah, R., & Asnawi, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Di Indonesia Tahun 1990 – 2017. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 2(2), 78. <https://doi.org/10.29103/jeru.v2i2.1721>
- Kementerian Tenaga Kerja dan, & Transmigrasi. (2011). *Kebijakan Ketenagakerjaan di Indonesia*. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_157809.pdf
- Kevin Tri Saputra, Syamsul Amar, A. (2018). PENGARUH INVESTASI SEKTOR PRIMER, INVESTASI SEKTOR SEKUNDER DAN INVESTASI SEKTOR TERSIER TERHADAP KESEMPATAN KERJA DI INDONESIA. *Ecosains*, 7(1), 33–42. <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekosains/article/view/110657/104184>
- Poesoro, A. W. L. (2005). Membangkitkan Investasi di Indonesia. *The Indonesia Institute*, 1–41. www.theindonesianinstitute.com
- Sjafii, A. (2009). Pengaruh Investasi Fisik Dan Investasi Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 1990-2004. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 3(1), 1–2009. <https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2009.003.01.3>
- Suhendra, I., & Istikomah, N. (2016). Faktor Penentu Investasi Portofolio Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 9(2). <https://doi.org/10.35448/jrat.v9i2.4314>